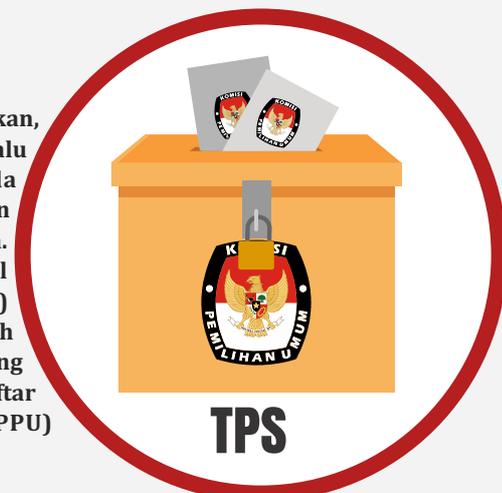




MENDADAK AL-ZAYTUN KALA PEMILU MENDEKAT

ADA PENGGELEMBUNGAN SUARA DI 2004, DIBUATKAN TPS KHUSUS PADA 2024

Pondok Pesantren Al Zaytun dengan pimpinan Panji Gumilang memicu polemik di masyarakat. Bahkan, Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko pun mengaku heran, kenapa gaduh soal Al Zaytun selalu mendadak mencuat kala Pemilihan Umum (Pemilu) mendekat? Diketahui, rupanya pada pelaksanaan Pemilu 2004, terjadi mobilisasi massa dan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di ponpes itu. Saat itu sekitar 24.000 orang terdaftar sebagai pemilih di Ponpes Al Zaytun. Padahal, penghuni ponpes tersebut hanya sekitar 5.000 orang. KPU dan Bawaslu Indramayu memastikan hal itu tidak akan terjadi lagi. Bahkan, KPU akan memfasilitasi penyediaan tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di Ma'had Al Zaytun untuk Pemilu 2024 nanti. Di sisi lain Moeldoko juga menepis tuduhan oleh Pendiri Yayasan Pesantren Indonesia Imam Supriyanto yang menyatakan dirinya sebagai pihak yang menghubungkan Panji Gumilang dengan Mabes Polri hingga partai politik. Makin panjang saja daftar kontroversinya saat kasus penistaan agama hingga dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) membelenggu.



TPS



(Baca Hal 11)

- Panwaslu menemukan fakta adanya santri di bawah umur yang ikut mencoblos di Ponpes Al Zaytun
- Ada pula 99 pemilih yang memiliki kartu pemilih ganda. Temuan itu terungkap dalam rapat gabungan antara Panwaslu Pusat, Panwaslu Jabar, Panwaslu Indramayu, dan Panwaslu Kecamatan Gantar

- Penolakan masuknya saksi dari sejumlah capres ke lokasi Al Zaytun.
- Mabes TNI mengakui adanya 21 kendaraan antar jemput (AJP) Mabes TNI yang digunakan meng-angkut massa ke Pondok Pesantren Al Zaytun, Senin (5/7/2004). Cilangkap menilai hal itu merupakan pelanggaran Instruksi Panglima TNI Nomor ST 120/2004 tentang netralitas TNI dalam pilpres.

●●● DUGAAN KECURANGAN PEMILU 2004 DI AL ZAYTUN

- Sekitar 24.000 orang terdaftar sebagai pemilih di Ponpes Al Zaytun. Padahal, penghuni ponpes tersebut hanya sekitar 5.000 orang.

Government (Hal.2)
**Ada 58 Proyek
Strategis
Jokowi Belum
Dibangun,
Yakin Selesai?**



Ada 58 Proyek Strategis Jokowi Belum Dibangun, Yakin Selesai?



(Ilustrasi) Tol Trans Sumatera menjadi salah satu proyek yang dikebut dan diharapkan diselesaikan paling lambat Semester I tahun 2024. (Dok)

JAKARTA -Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) melaporkan 58 Proyek Strategis Nasional (PSN) di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi masih belum dibangun. Proyek tersebut termasuk Kereta Semi Cepat Jakarta-Surabaya.

"Contohnya yang 58 ya MRT, kereta api Jakarta-Surabaya, itu semi cepat. Pelabuhan Ambon, itu kan beberapa proyek. (Perumahan Umum) PU misalnya tol Trans Sumut belum selesai semua," ujar Ketua Tim Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo saat ditemui di Gedung Kemenko Perekonomian, Kamis (13/7/2023).

Selain itu, Wahyu menyebut Tol Bocimi dan Tol Getaci juga masuk dalam daftar PSN yang belum selesai dibangun. "Bocimi kan katanya mau diteruskan sampai di Sukabumi. Kalau Getaci itu kan mungkin akan diteruskan tahap pertama yang sampai Tasik, jadi masih terus didorong ini semua," katanya.

Wahyu juga menyinggung Blok Masela masuk dalam salah satu daftar PSN tersebut. Ia memastikan kerja sama proyek itu akan selesai tahun

ini. "Pertamina baru deal, pasti dia akan bicara lagi dengan mitra-mitranya. Pertamina kan sebagai pemain yang baru, bicara dengan Inpex, harus bicara lagi sampai nyusun rencana kerja seperti apa. Yang penting harusnya Kementerian ESDM

mendorong supaya kerja sama clear tahun ini," jelas Wahyu.

Sebelumnya, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto memimpin rapat terbatas membahas akselerasi penyelesaian PSN dengan Menteri Perhubungan Budi Karya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasmita, dan Menteri ESDM Pak Arifin Tasrif pada hari Selasa (11/7/2023).

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan, Jokowi meminta agar seluruh PSN dapat dirampungkan sebelum tahun 2024 terutama bandara, jalan tol, bendungan, dan juga smelter.

"Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi prioritas APBN #UangKita saat ini untuk menciptakan Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera," tulis Sri Mulyani dalam akunnya, dikutip Kamis (13/7/2023).

Sri Mulyani berharap penyelesaian berbagai PSN ini akan semakin mendorong produktivitas, sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat maupun pertumbuhan ekonomi nasional.

Sri Mulyani mengatakan infrastruktur merupakan salah satu prioritas nasional yang juga menjadi prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) saat ini untuk menciptakan Indonesia yang maju, adil dan sejahtera.

"Semoga penyelesaian berbagai PSN ini akan semakin mendorong produktivitas sehingga memberikan dampak positif kepada masyarakat yang kemudian juga memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," ucapnya.

158 Proyek Rampung

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mencatat per 11 Juli 2023 sebanyak 158 Proyek Strategis Nasional (PSN) rampung selama sewindu atau delapan tahun. Total nilai proyek tersebut mencapai lebih dari Rp 1.000 triliun.

"158 proyek itu senilai Rp 1.102,6 triliun," kata Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian yang juga Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), Wahyu Utomo di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (13/7/2023).

Terbaru PSN yang telah selesai dan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah Tol Cisumdawu. Sisanya ada 25 proyek lagi yang ditargetkan selesai dari 30 proyek tahun ini.

"Tahun ini kita targetnya 30, tapi sudah selesai 5. Jadi kita harapkan sekarang sampai Desember masih ada tambahan 25 proyek lagi yang selesai di tahun ini," beber Wahyu.

Lalu pada 2024 targetnya ada 31 proyek lagi yang akan selesai. Dalam hal pembiayaan, Wahyu mendorong pihak swasta untuk ikut serta karena tidak mungkin Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menanggung sendirian.

"Keterlibatan dari swasta sangat penting baik luar negeri maupun dalam negeri dan kita inginkan swasta dalam negeri lebih berkiprah dalam menyelesaikan program-program pemerintah khususnya proyek strategis nasional," ucapnya.

Berdasarkan Permenko Nomor 21 tahun 2022, terdapat 210 proyek dengan 12 program sebagai PSN dengan estimasi total nilai investasi (capex) mencapai Rp 5.764 triliun. Jokowi menargetkan agar seluruhnya bisa selesai di 2024 setidaknya terkait pembebasan lahan dan perizinan. (wid,rls,ant,kum/dya)

165,3

●●●
NILAI PROYEK STRATEGIS NASIONAL (PSN) PERIODE 2019-2022

123,1

125,9

140,1

101,2

2019

2020

2021

Jan-Agt 2022

Sep-Des 2022

●●●
DANA PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG DIBELANJAKAN OLEH LMAN DARI APBN (MEI 2023)

Jalan tol
95.490.000.000.000

Irigasi
610.000.000.000

Bendungan
12.190.000.000.000

Kawasan strategis wisata
85.240.000.000

Jalur KA
3.088.000.000.000

Air baku
64.000.000.000

Pelabuhan
800.000.000.000

Ibu Kota Negara
60.260.000.000

DPR Perpanjang Pembahasan RUU ASN hingga Narkotika

JAKARTA - Rapat Paripurna DPR menyepakati masa perpanjangan pembahasan terhadap enam Rancangan Undang-Undang (RUU) hingga masa persidangan I yang akan datang.

Adapun enam RUU tersebut adalah RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan, RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, RUU tentang Perubahan atas RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Hal itu terjadi dalam penutupan masa persidangan V Tahun Sidang 2022-2023, Kamis (13/7/2023) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"Sehubungan dengan hal tersebut, maka rapat paripurna hari ini apakah kita dapat menyetujui perpanjangan waktu pembahasan terhadap enam rancangan undang-undang yang dimaksud sampai dengan masa sidang pertama yang akan datang?" kata Wakil Ketua DPR Lodewijk F Paulus yang memimpin rapat.

"Setuju," ucap para peserta sidang yang diiringi ketuk palu dari Lodewijk tanda persetujuan.

Lodewijk mengatakan, pihak yang meminta persetujuan perpanjangan pembahasan enam RUU itu di antaranya, Komisi II, Komisi III, Komisi IV dan Komisi VII.

"Berdasarkan laporan dari pimpinan Komisi II, pimpinan Komisi III, pimpinan Komisi IV dan pimpinan Komisi VII DPR RI pada rapat konsultasi pengganti rapat bamus tanggal 12 Juli 2023, yang mengajukan permohonan perpanjangan waktu pembahasan terhadap rancangan undang-undang," ungkap Sekretaris Jenderal Partai Golkar ini.

Setelah membacakan hal tersebut, Lodewijk melanjutkan agenda rapat paripurna yaitu pembacaan pidato penutupan masa sidang oleh Ketua DPR Puan Maharani.

Perlu diketahui, rapat paripurna kali ini dihadiri oleh 312 anggota dari total 575 anggota Dewan periode 2019-2024. Hal ini diketahui saat Lodewijk membacakan daftar hadir yang diperoleh dari Sekretariat Jenderal DPR. "Dan dihadiri oleh anggota dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI," ujar Lodewijk.

Bocoran: Honorer Jadi PNS Part Time

Terpisah, Anggota dewan di Komisi II DPR tengah memfinalisasi



pengaturan unsur baru aparatur sipil negara (ASN), yaitu PPPK Paruh Waktu atau Part Time dalam Rancangan Undang-Undang yang merevisi UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Salah satunya tentang skema rekrutmennya.

Anggota Komisi II DPR Guspari Gaus mengatakan, dalam konsep yang dibahas dalam RUU itu, PPPK Paruh Waktu yang menjadi unsur baru ASN selain PNS dan PPPK itu akan turut menjadi wadah bagi para tenaga honorer supaya tidak terkena PHK saat dihapusnya status tenaga non-ASN atau honorer mulai 28 November 2023.

Meski begitu, ia menekankan para tenaga honorer tetap harus mengikuti proses seleksi atau tes sebagaimana para CASN yang berkompetisi untuk masuk ke pemerintahan, baik di pusat maupun daerah melalui tiga unsur ini. Maka, ia memastikan unsur baru itu tidak menjadi wadah supaya tenaga honorer langsung diangkat jadi ASN.

"Eggak (otomatis diangkat), jadi gini, tiga unsur itu tetap diakomodir oleh pemerintah, bukan langsung diterima tentu ada seleksinya," kata Guspari kepada CNBC Indonesia, Rabu (12/7/2023).

Guspari menegaskan, proses seleksi ini jelas dibutuhkan untuk memverifikasi para tenaga honorer yang bisa masuk ke pemerintahan sesuai kemampuannya. Maka, proses transisi dalam rekrutmennya yang di atur dalam RUU ini tidak akan ada

pengangkatan langsung.

"Ini gambaran saya ya, enggak mungkin, gunanya adalah untuk memverifikasi para calon ASN mana ranahnya bisa ditampung di PNS, PPPK Penuh Waktu, dan PPPK Part Time itu," tegasnya.

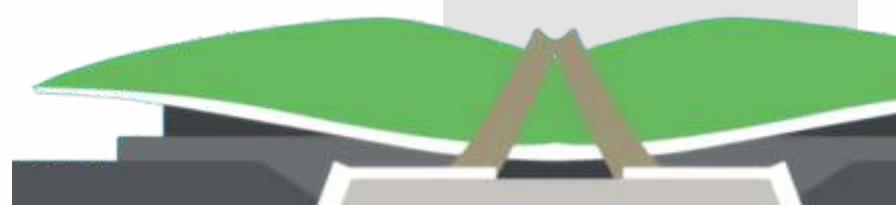
Ia memastikan, unsur PPPK Paruh Waktu ini betul-betul sudah masuk ke dalam ketentuan revisi UU ASN yang terbaru bukan baru sebatas konsep sebagaimana yang dikatakan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas. Ia menilai, ini karena penting memasukkan unsur-unsur pegawai pemerintah yang menjadi kriteria ASN dalam UU.

Sementara itu, untuk teknis hak-hak yang akan mereka peroleh, tentu tidak akan masuk di dalam RUU itu, melainkan pada tingkatan aturan turunannya seperti peraturan pemerintah.

"Sudah (masuk RUU) kan kami sudah bahas DIM, yang bahas DIM kan enggak menterinya, eselon 1 aja. Artinya sekarang ini revisinya belum selesai, belum ketok palu, tapi sudah dibahas dengan Kementerian PANRB, bahas DIM dan sudah selesai tinggal ketok palu aja," tegas politisi PAN itu. (wid,rls,ant,ist/dya)

ENAM RUU DIPERPANJANG MASA PEMBAHASANNYA

- RUU tentang Energi Baru dan Energi Terbarukan,
- RUU tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya,
- RUU tentang Perubahan atas RUU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,
- RUU tentang Hukum Acara Perdata,
- RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,
- RUU tentang Perubahan Keempat atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.



Buntut Pencopotan Gelar Guru Besar UNS, Dua Petinggi MWA Gugat Nadiem



Wakil Ketua MWA UNS, Hasan Fauzi, menjelaskan pelaksanaan Sidang Pleno dalam Pemilihan Rektor UNS Periode 2023-2028 di Kampus UNS, Jumat (11/7/2023). (Foto: tempo/septia ryanthie)

SOLO - Dua mantan petinggi Majelis Wali Amanat (MWA) yang juga guru besar Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo mengajukan keberatan atas sanksi disiplin yang dijatuhkan oleh Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Nadiem Makarim, kepada mereka. Selain itu, mereka juga melakukan akan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

Kedua guru besar tersebut yaitu Hasan Fauzi yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua MWA UNS dan Tri Atmojo Kusmayadi yang dulu menjabat sebagai Sekretaris MWA UNS mengajukan keberatan diajukan lantaran keduanya merasa tak pernah menyalahgunakan wewenang seperti yang disebutkan dalam Surat Keputusan Mendikbudristek tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin. Dalam surat itu, Hasan dan Tri disebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 yang salah satunya pasalnya mengenai penyalahgunaan wewenang.

"Tuduhan penyalahgunaan wewenang karena kami berkirim surat ke menteri (Nadiem), dianggap mempengaruhi menteri. Tidak ada penyalahgunaan wewenang. MWA hanya berkirim surat ke Menteri melaporkan tentang hasil Pilrek dan menyampaikan yang terjadi di UNS," tulisnya dikutip dari tempo.co, Kamis (13/7/2023).

Hasan membantah adanya tuduhan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, yang dirinya lakukan hanyalah bersurat kepada Menteri Nadiem terkait hasil pemilihan rektor UNS dan memberikan solusi atas situasi dan kondisi yang terjadi saat itu.

"Apakah yang demikian itu menyalahgunakan wewenang? Sedangkan Prof Tri (Tri Atmojo) yang juga hanya menjalankan tugas sebagai Ketua P3CR (Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor), juga dituduh menyalahgunakan wewenang. Padahal hanya menjalankan tugas sebagai Ketua P3CR," katanya.

Selain mengajukan protes kepada Kementerian Pendidikan, Hasan juga akan menempuh jalur hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. "Sudah mengajukan keberatan ke Kementerian dan segera PTUN," katanya.

Sebelumnya, dibatalkannya Pemilihan Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo yang beberapa waktu lalu sempat menuai polemik ternyata berbuntut panjang. Dua mantan petinggi Majelis Wali Amanat (MWA) UNS, yaitu Hasan Fauzi yang semula menjabat sebagai wakil ketua MWA UNS dan Tri Atmojo Kusmayadi yang semula menjabat sebagai sekretaris MWA UNS, mendapatkan sanksi dari Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim.

Sanksi untuk Hasan Fauzi dan Tri Atmojo berupa pembebasan jabatan sebagai guru besar UNS dan kini

keduanya menjabat sebagai jabatan pelaksana. Hal itu dibenarkan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Wakil Rektor II Bidang Umum dan Sumber Daya Manusia (SDM) UNS, Muhtar dikutip dari tempo.co, Rabu (12/7/2023).

Muhtar menjelaskan penjatuhan sanksi kepada Hasan Fauzi dan Tri Atmojo itu masing-masing berdasarkan Surat Keputusan (SK) Mendikbudristek Nomor 29985/RHS/M/08/2023 dan Nomor 29986/RHS/M/08 Tahun 2023 tertanggal 26 Juni 2023. Surat itu berisi tentang Penjatuhan Hukum Disiplin Pembebasan Dari Jabatan Guru Besar Menjadi Jabatan Pelaksana. Hukuman disiplin berlaku selama 12 Bulan.

"Ini bunyi SK. Otomatis gelar guru besar sudah tidak boleh lagi dipakai oleh yang bersangkutan selama 12 bulan. Namun untuk gelar lain selain guru besar masih berlaku seperti gelar akademik jenjang S1 sampai S3," kata Muhtar kepada wartawan yang menemui di ruang kerjanya.

Mengacu pada dua SK itu, Muhtar menjelaskan, baik Hasan Fauzi maupun Tri Atmojo, disebut telah melakukan pelanggaran berdasarkan pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam salinan SK Mendikbudristek itu disebutkan ada tiga pasal yang dilanggar oleh

keduanya. Saat ditanya apakah penjatuhan hukuman itu terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Rektor UNS pada 2022 lalu, Muhtar mengaku tidak tahu karena audit investigasi dilakukan sejak November 2022.

"Masuknya kategori pelanggaran berat," kata Muhtar.

Adapun pasal yang dilanggar, yakni pasal 3e yang berbunyi PNS wajib melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab. Pasal 3f yang berbunyi PNS wajib menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Serta pasal 5a PNS dilarang menyalahgunakan wewenang.

"Secara detail kami tidak dijelaskan apa saja pelanggaran oleh Mendikbudristek. Karena itu berdasarkan investigasi yang pada saat itu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral (Irjen) sudah sejak November 2022. Justru yang tahu yang bersangkutan, pelanggaran apa saja bisa ditanyakan pada yang bersangkutan," kata Muhtar.

Muhtar mengatakan terdapat perbedaan hak dan kewajiban antara guru besar (profesor) dengan jabatan pelaksana. Di antaranya dari segi pembayaran gaji, yang bersangkutan juga akan disesuaikan dengan jabatan yang baru.

Jika sebelumnya, jabatan guru besar dapat dicalonkan sebagai jabatan strategis, baik dalam perguruan tinggi UNS maupun di luar UNS, untuk jabatan pelaksana tidak bisa. Keduanya juga dibebaskan dari kewajiban akademik sebagai dosen. Artinya yang bersangkutan tidak dapat lagi mengajar maupun melakukan pembimbingan untuk mahasiswa UNS.

"Jabatan pelaksana itu adalah tenaga administrasi terbawah, dan berdasarkan SK itu keduanya dibebaskan dari hak dan kewajiban sebagai pelaksana akademik dosen," kata Muhtar.

Selain itu, jika usia pensiun guru besar adalah 70 tahun, maka untuk pelaksana hanya 58 tahun. Lantaran usia Hasan Fauzi dan Tri Atmojo saat ini sudah melebihi usia pensiun jabatan pelaksana, maka secara otomatis keduanya sudah memasuki masa pensiun. Namun untuk jabatan baru sebagai pelaksana, Muhtar mengatakan keduanya bakal diangkat dengan SK tersendiri.

"Keputusan ini mulai berlaku pada hari kerja ke 15, terhitung sejak tanggal 6 Juli kemarin. Berarti tanggal 21, yaa berlaku efektif tanggal 22 (Juli) berarti" kata Muhtar. (lut/dya)



Secara detail kami tidak dijelaskan apa saja pelanggaran oleh Mendikbudristek. Karena itu berdasarkan investigasi yang pada saat itu dilaksanakan oleh Inspektur Jendral (Irjen) sudah sejak November 2022. Justru yang tahu yang bersangkutan, pelanggaran apa saja bisa ditanyakan pada yang bersangkutan."

MUHTAR

Pelaksana Tugas Wakil Rektor II Bidang Umum dan SDM UNS

Satpam RSUD Vs Anggota DPRD Tulungagung Saling Laporkan, Polisi Datangkan Saksi Ahli

TULUNGAGUNG - Kasus saling lapor antara oknum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Security Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tulungagung terus bergulir. Bahkan pihak penyidik dari Polres Tulungagung akan memanggil saksi ahli.

Polisi telah memeriksa kedua belah pihak, namun untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, penyidik akan mendatangkan saksi ahli untuk dimintai keterangan atas dua laporan yang telah diterimanya. Kasatreskrim Polres Tulungagung, AKP Agung Kurnia Putra, melalui Kanit Pidana Khusus (Pidsus) Iptu Zico Bintang menerangkan, pemeriksaan kedua belah pihak tengah dilakukan untuk melengkapi berkas laporan. "Memeriksa kedua belah pihak. Setelah ini juga memeriksa saksi ahli," kata Zico, dikutip dari jatimtimes, Kamis (13/7/2023).

Ziko menegaskan, pihaknya terus melakukan pemeriksaan laporan dari security atau RSUD dr Iskak Tulungagung atas dugaan kekerasan dan laporan dugaan pencemaran nama baik dari anggota DPRD Kabupaten Tulungagung JTA. "Sementara masih riksa (pemeriksaan)," tegasnya.

Lanjut Zico, pihaknya juga memberikan kesempatan mediasi sebelum proses berjalan ke tahap selanjutnya. "Nanti kalau ada perkembangan kita infokan, karena mediasi itu penting sesuai dengan protokol," ungkapnya.

Seperti diketahui, JTA politisi PDIP ini melaporkan RSUD dr Iskak Tulungagung setelah video rekaman CCTV yang merekam dirinya tersebar di media sosial. JTA melapor ke Polres Tulungagung pada Rabu (5/7/2023) setelah sebelumnya pihak RSUD Iskak melaporkan dirinya terkait dugaan kekerasan.

Selain berproses di kepolisian, kasus yang melibatkan anggota legislatif ini juga berproses di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Peristiwa ini terjadi Selasa (27/6/2023) sekitar pukul 20.30 WIB. Dalam video yang beredar, anggota DPRD ini diduga tak diterima ditegur oleh Satpam.

Teguran disampaikan karena Satpam melihat pengunjung sedang merokok di area rumah sakit dan masuk ke Graha Mandiri dengan membawa anak di bawah umur. Karena dianggap cara menegurnya tidak beretika, JTA mendekati dan membuka paksa masker Satpam itu.

Atas tindakan tersebut, JTA diduga melakukan intimidasi terhadap petugas keamanan RSUD dr Iskak. Insiden tersebut terekam kamera pengawas (CCTV) yang terpasang di area sekitar gedung Graha Mandiri,



Potongan video kejadian dugaan intimidasi yang dilakukan oknum legislator berinisial JTA kepada petugas keamanan di area Graha Mandiri RSUD dr. Iskak Tulungagung (foto: antara)

dengan durasi 1 menit 44 detik.

"Ada kejadian (ketegangan) yang melibatkan tenaga satpam kami dengan pengunjung (berlatar) anggota DPRD (Tulungagung). Kejadian nya pada Selasa (27/6/2023), sekitar pukul 20.30 WIB," kata Kepala Tata Usaha RSUD dr. Iskak Tulungagung Eko Sudharmono, dikutip dari jpnn, Senin (3/7/2023).

Dia mengatakan manajemen RSUD dr. Iskak Tulungagung akan memberikan perlindungan bagi satpam yang mendapat intimidasi karena berusaha menegakkan aturan terkait ketentuan membesuk pasien dan larangan merokok di dalam areal/lingkungan rumah sakit.

"Tu awalnya petugas menegur pengunjung tersebut (belakangan diketahui berinisial JTA, anggota DPRD Tulungagung) yang sedang merokok di area rumah sakit, kemudian masuk ke graha mandiri dengan membawa anak di bawah umur," tuturnya.

Diduga tak terima ditegur oleh petugas keamanan (satpam), JTA lalu mendatangi penjaga tersebut dan bersitegang. Pada detik ke-22 di rekaman video, nampak JTA melepas masker petugas jaga dan mengatakan sesuatu pada petugas tersebut. JTA lalu kembali ke pintu lift, tak lama berbalik kembali ke petugas tersebut dan menyentuh kepala petugas jaga tersebut pada detik ke-65.

Petugas yang mendapat perlakuan itu cuma diam, sedang rekannya berusaha meredakan suasana. Petugas jaga tidak tahu bahwa dia berhadapan dengan seorang anggota dewan.

"Tidak tahu, satpam juga tidak tahu," kata Eko.

Pihak RSUD dr. Iskak sudah memediasi kejadian tersebut dan berusaha menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan. Namun, ada desakan dari pengelola rumah sakit untuk memberikan perlindungan pada pegawainya saat bertugas. "Apabila menertibkan aturan harus ada perlindungan dari manajemen," kata Eko. Akhirnya pihak melaporkan kasus ini ke Polres Tulungagung.

Kepala TU RSUD dr Iskak, Eko Sudharmono, membenarkan telah melaporkan kasus ini ke polisi. Itu setelah pihaknya mendapatkan izin dan petunjuk dari pimpinan. "Sudah kita laporkan. Kita tidak langsung melaporkannya. Karena saat itu masih menyampaikannya kepada pimpinan, jadi tidak langsung dilaporkan," terangnya dikutip dari memorandum, Senin (10/7/2023).

Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Marsano mengungkapkan JTA sudah dipanggil oleh fraksinya. "Yang bersangkutan sudah dipanggil. Dia ngaku saat itu tidak ada pemukulan atau kekerasan. Hanya saja, pak Joko Tri ini melepaskan maskernya satpam," tukasnya.

Selanjutnya, pihaknya mengaku akan berkoordinasi dengan Badan Kehormatan (BK) DPRD kabupaten Tulungagung guna membahas perihal ini. "Nanti juga akan disampaikan ke sana, ke BK," ucapnya.

Sementara itu, JTA mengakui

sempat terjadi situasi kurang nyaman saat dia melakukan kunjungan besuk ke RSUD dr. Iskak bersama keluarga. Namun, dia membantah melakukan kekerasan pada petugas RSUD tersebut, melainkan sebatas melepas masker milik petugas karena nada bicaranya dinilai tidak sopan. "Tidak ada (kekerasan), aku melepas masker dia iya," jawab JTA dikutip dari jpnn.

Terkait peristiwa itu, Bupati Tulungagung, Maryoto Birowo, berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bersama bagi kedua pihak. Baik anggota DPRD Kabupaten Tulungagung maupun Satpam RSUD dr Iskak. "Semuanya harus belajar dari sini, baik pihak satpamnya maupun pihak dewannya," ujarnya, dikutip dari memorandum, Senin (10/7/2023).

Bupati Maryoto memahami, mungkin peristiwa saat itu terjadi karena kondisi psikis JTA sedang memikirkan keluarganya yang sakit. Kemudian di sisi lain, satpam juga harus menjalankan tugas yang diberikan oleh pimpinannya. Oleh sebab itu, menurut Bupati Maryoto jalan terbaik dalam kasus ini adalah cara kekeluargaan yang berujung damai. "Paling baik tetap kekeluargaan dan damai," jelasnya.

Bukan tidak mungkin, Bupati akan menjadi jalan tengah atas masalah ini. Termasuk mempertemukan keduanya agar ada solusi. Sehingga cepat selesai masalahnya. "Kita bersedia menjadi mediator, tentu kita akan panggil dulu kedua belah pihak, tapi saat ini belum bisa kami lakukan, karena masih banyak kegiatan lain, mungkin nanti," ucapnya. (lut/dya)



NABILA SYAKIEB

Tampil Keren di Kompetisi Berkuda

Nabila Syakieb baru-baru ini kembali tampil keren saat ikut kompetisi berkuda. Paras cantik artis kelahiran 1985 tersebut sukses bikin salfok lantaran tetap awet muda.

KINI jarang terlihat tampil di layar kaca, tidak sedikit netizen mengaku merindukan akting Nabila Syakieb di sinetron.

Meski begitu, artis berdarah Arab ini cukup aktif menyapa penggemar melalui akun media sosial. Termasuk berkaitan dengan hobinya berkuda.

Tidak tanggung-tanggung, Nabila Syakieb bahkan memiliki tempat berkuda sendiri dan mengelola sebuah sekolah latihan berkuda bersama suami.

Ia pun kerap menunjukkan aksi kerennya kala berkuda seperti dalam potret ini. Artis istri dari Reshwara Argya Ardinal ini tampak piawai saat menaiki kuda dan melewati berbagai rintangan.

Kecantikan Nabila Syakieb yang sudah lama berkarir di dunia hiburan ini memang kerap bikin salfok netizen. Terlebih di usianya kini tidak muda lagi pesona cantik Nabila Syakieb seolah nggak pernah luntur.

Di setiap aksinya ketika berkuda, Nabila Syakieb tak lupa mengenakan berbagai atribut dan perlengkapan khusus. Sebut saja seperti helm, sepatu berkuda, hingga sarung tangan.

Meskipun olahraga secara outdoor, Nabila Syakieb terlihat sangat menikmati hobinya tersebut. Tak lupa juga, Nabila Syakieb membawa kacamata hitam untuk menyempurnakan penampilannya kala ikut kompetisi berkuda.

Nabila Syakieb tetap terlihat berkelas. Ia pun menambahkan aksesoris berupa kalung simple yang membuat penampilannya makin mewah.

Profil

Wanita kelahiran Bogor 18 November 1985 ini kerap membintangi sinetron di tanah air. Selain sebagai aktris, Nabila Syakieb dikenal lewat bintang iklan. Ia merupakan putri pasangan Syakieb Ali Balweel dan Huriyah Nasir.

Nabila memiliki seorang saudara laki-laki yang juga berada di dunia entertainmen yakni Ali Syakieb.

Tak lama setelah menikah dengan Reshwara Argya Radinal tahun 2015, Nabila kemudian jarang terlihat dilayar kaca.

Apalagi setelah ia kini menjadi seorang ibu dan mengasuh dua anaknya.

Nabila Syakieb mengawali kariernya dari seorang model. Tahun 1999 ia menjadi finalis pemilihan gadis sampul.

Prestasi itu kemudian membawanya hingga mendapat tawaran bintang iklan dan video klip. Kariernya kemudian terus melejit.

Tahun 2002 ia main dalam sinetron perdananya berjudul Cinta SMU. Sukses di sinetron perdananya itu, Nabila Syakieb pun bermain di beberapa sinetron di tanah air.

Prestasi itu kemudian membawanya hingga mendapat tawaran bintang iklan dan video klip. Kariernya kemudian terus melejit.

Tahun 2002 ia main dalam sinetron perdananya berjudul Cinta SMU. Sukses di sinetron perdananya itu, Nabila Syakieb pun bermain di

beberapa sinetron di tanah air.

Ia bahkan sempat bermain di film berjudul: The Real Pocong pada tahun 2009. Soal prestasi, Nabila Syakieb cukup banyak mendapatkan penghargaan.

Tahun 2012 ia mendapat nominasi Aktris Terfavorit di ajang Panasonic Gobel Award.

Kehidupan Pribadi

Sosok Nabila Syakieb menjadi wanita cantik yang menjadi idola saat itu. Ia tak pernah absen dan muncul di sinetron di tanah air.

Sukses di dunia entertainment, tahun 2015 Nabila Syakieb kemudian dipersunting oleh pria muda bernama Reshwara Argya Radinal. Pernikahan keduanya sempat menjadi buah bibir.

Usia Nabila Syakieb dengan Reshwara Argya Radinal terpaut 7 tahun. Namun hal itu bukan menjadi penghalang keduanya duduk di pelaminan.

Kini pernikahannya telah dikarunia dua orang anak putra dan putri. Selain itu, Reshwara juga memiliki sikap tak mudah cemburu dan memaklumi pekerjaan Nabila.

"Terus udah gitu dia nggak cemburuan sama sekali, gue syuting sama orang ada adegan pegang tangan apa segala macem dia cuek," ujar Nabila (berbgai sumber)



9 OBAT ALAMI UNTUK ASAM URAT YANG AMAN

ASAM urat dapat diobati dengan obat-obatan yang didapat dari dokter. Namun, beberapa orang mencari alternatif pengobatan, termasuk bahan alami.

Asam urat adalah sejenis radang sendi yang menyebabkan rasa sakit yang mirip dengan osteoarthritis meski ada beberapa perbedaan yang berbeda.

Ada banyak pilihan untuk membantu atau mencegah serangan asam urat di rumah. Sebagian besar merupakan bahan alami dan memiliki sedikit atau tanpa efek samping.

Dilansir dari Verywell Health, asam urat biasanya terjadi pada kaki, pergelangan kaki, lutut, tangan, dan pergelangan tangan. Biasanya serangan asam urat berlangsung sekitar lima hingga 10 hari.

Asam urat adalah produk limbah yang terbentuk dari pemecahan purin atau zat yang ditemukan secara alami di dalam tubuh dan makanan tertentu.

Makanan yang mengandung purin tinggi contohnya adalah minuman beralkohol, daging merah, ikan, kerang, jamur, asparagus, kembang kol, dan bayam.

Jika ingin menggunakan bahan alami sebagai pengobatan, Anda bisa menanyakan terlebih dahulu ke dokter.

Ini bahan-bahan alami yang dapat digunakan sebagai obat asam urat:

1. Vitamin C

Beberapa bukti menunjukkan vitamin C dapat membantu mengurangi kadar asam urat. Namun, vitamin C tidak cocok untuk semua orang. Orang dengan penyakit ginjal harus berkonsultasi dengan penyedia layanan kesehatan sebelum mengonsumsi suplemen vitamin C.

Vitamin C meningkatkan penyerapan beberapa jenis zat besi dari makanan sehingga penderita hemokromatosis sebaiknya tidak mengonsumsi suplemen vitamin C.

2. Ceri

Ceri adalah obat rumahan yang populer untuk asam urat. Jumlah yang biasanya disarankan adalah antara setengah cangkir atau satu pon ceri sehari. Sebagai obat asam urat, ceri dimakan atau dibuat jus. Ekstrak ceri juga tersedia di beberapa toko makanan kesehatan.

3. Magnesium

Magnesium adalah mineral makanan. Dilansir dari Healthline, beberapa mengklaim magnesium baik untuk asam urat. Sebuah studi pada 2015 menunjukkan bahwa magnesium yang cukup dikaitkan

dengan kadar asam urat yang lebih rendah dan lebih sehat sehingga berpotensi menurunkan risiko asam urat.

4. Jahe

Jahe adalah makanan kuliner dan ramuan yang diresepkan untuk kondisi peradangan. Kemampuannya untuk membantu asam urat didokumentasikan dengan baik. Salah satu studi menemukan jahe topikal mengurangi rasa sakit yang berhubungan dengan asam urat.

5. Seledri atau biji seledri

Seledri adalah makanan tradisional yang digunakan untuk mengobati masalah buang air kecil. Untuk asam urat, ekstrak dan biji sayuran telah menjadi pengobatan rumahan yang populer. Meskipun penelitian ilmiah masih sedikit, diperkirakan seledri dapat mengurangi peradangan.

6. Teh jelatang

Jelatang (*Urtica dioica*) adalah

obat herbal untuk asam urat yang dapat mengurangi peradangan dan nyeri. Penggunaan tradisional sering disebut dalam penelitian. Untuk mencoba teh ini, seduh secangkir dengan air mendidih. Seduh 1 hingga 2 sendok teh jelatang kering per cangkir air, lalu minum 3 gelas per hari.

7. Hibiscus atau kembang sepatu

Hibiscus adalah bunga taman, makanan, teh, dan obat herbal tradisional. Ini merupakan obat tradisional yang digunakan untuk mengobati asam urat. Satu penelitian yang diujikan ke tikus menunjukkan bahwa kiembang sepatu dapat menurunkan kadar asam urat.

8. Apel

Apel mengandung asam malat yang menurunkan asam urat. Namun, tidak ada penelitian yang mendukung ini untuk asam urat. Apel

juga mengandung fruktosa yang dapat memicu hiperurisemia dan menyebabkan serangan asam urat.

10. Pisang

Pisang dianggap baik untuk asam urat. Pisang kaya akan potasium yang membantu jaringan dan organ dalam tubuh berfungsi dengan baik. Namun, pisang juga mengandung gula, termasuk fruktosa yang bisa menjadi pemicu asam urat. Banyak makanan yang lebih tinggi potasium dan lebih rendah gula daripada pisang, seperti sayuran hijau dan alpukat (bisnis)



AMBISI TIKTOK JADIKAN INDONESIA LUMBUNG BISNIS

INDUK usaha TikTok asal China yakni ByteDance tampak begitu serius menggarap dan bahkan memfokuskan ekspansinya ke Indonesia.

Bahkan Indonesia beberapa kali menjadi negara pertama yang dijadikan perseroan untuk menjangkau sejumlah terobosan bisnis barunya.

Ambisi TikTok menguasai industri e-commerce di Indonesia makin terlihat jelas. Bahkan, bos besar TikTok datang langsung ke RI dan memilih bertemu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Shou mengungkapkan kunjungannya ke Indonesia secara khusus ingin bertemu dengan Mendag untuk berterima kasih secara langsung.

Ia mengklaim izin yang dimiliki oleh TikTok Shop membuat per-usahaan bisa

menggaet 5 juta pelaku bisnis untuk berjualan lewat TikTok.

Dari 5 juta pedagang di TikTok, mayoritas adalah UMKM dan 2 juta di antaranya sudah membuka lapak di TikTok Shop.

"Saya ingin bekerja dengan regulator untuk memastikan bahwa TikTok akan aman untuk pengguna Indonesia. Salah satu harapannya

adalah barang Indonesia dapat dijual tak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri melalui platform TikTok," kata dia.

Shou berkomitmen untuk terus berkembang dan berinvestasi di Indonesia. Ia mengatakan Indonesia merupakan salah satu pasar terpenting di dunia dan pasar terpenting kawasan Asia Tenggara.

Zulkifli mengatakan TikTok memiliki pengaruh besar terhadap ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia, khususnya dalam mempercepat proses digitalisasi.

"Tidak hanya menjadi platform hiburan, TikTok juga berpengaruh besar terhadap ekosistem UMKM Indonesia. Kami senang, perkembangan digital seperti TikTok mempermudah pertemuan antara pembeli dengan produsen," kata Zulkifli pada Shou, dikutip dari keterangan resmi yang diterima CNBC Indonesia.

TikTok Kejar Shopee-Tokopedia

TikTok memang dikabarkan memasang target ambisius untuk platform belanja online 'TikTok Shop' pada tahun ini. Transaksi penjualan (GMV) dipatok sampai US\$ 20 miliar atau setara Rp 297 triliun, menurut sumber dalam perusahaan.

Angka itu jauh meningkat ketimbang GMV 2022 sebesar US\$ 4,4 miliar. Optimisme TikTok berasal dari pertumbuhan signifikan di pasar Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Firma riset Insider Intelligence menyebut pengguna aktif TikTok di Asia Tenggara mencapai 135 juta hingga Q1 2023. Indonesia menjadi negara yang berkontribusi paling besar dengan basis pengguna 113 juta.

Potensi TikTok Shop tak bisa diremehkan pemain e-commerce lama seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Padahal, TikTok Shop baru hadir di Asia Tenggara pada 2021 lalu.

Menurut survei dari firma riset Cube Asia, pengeluaran pengguna di TikTok Shop membuat mereka mengurangi pengeluaran di Shopee dan Lazada.

Di Indonesia, Thailand, dan Filipina, pengeluaran pengguna di Shopee turun 51% karena alokasinya pindah ke TikTok Shop.

Sementara di Lazada turun 45% dan di gerai offline anjlok 38%.

Secara spesifik di Indonesia, TikTok Shop mengantongi GMV US\$ 2,5 miliar dalam periode 3 bulan di Q1 2023, menurut data Cube Asia.

Namun, GMV Shopee memang masih jauh di atas TikTok Shop. Sepanjang 2022m GMV Shopee mencapai US\$ 73,5 miliar. Sementara itu, Lazada meraup GMV US\$ 21 miliar.

TikTok juga mencatatkan pertumbuhan yang pesat di Asia Tenggara. Dari total karyawan TikTok yang berjumlah 100 orang, kini karyawan TikTok di regional Asia Tenggara sudah tembus 10 ribu orang. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri total ada 2 ribu orang.

Ia juga bercerita, Asia Tenggara merupakan tempatnya dibesarkan. Dulunya, ia tumbuh di Singapura.

Ia juga punya kedekatan dengan Indonesia, di mana ia pertama kali mengunjungi Indonesia pada usia 6 tahun. Oleh karena itu, ia menganggap Indonesia dan Asia Tenggara sebagai salah satu rumahnya.

"Jadi kami ingin berinvestasi secara proporsional berdasarkan peluang yang dihadirkan dan juga kedekatannya melalui semua ini. Jadi ini adalah waktu yang sangat menyenangkan," tutupnya (berbagai sumber)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANNGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, KIKI AMALIA GUYEN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenalan wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenalan wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenalan atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

MERASA RENAH DIRI DAN SELALU PAYAH

INFERIORITY complex kondisi perasaan tidak mampu atau rendah diri, nyata atau imajiner. Mengutip Verywell Mind, kondisi itu akibat situasi ketika seseorang merasa kurang unggul daripada kawan-kawan sekitarnya.

Orang dengan inferiority complex menganggap dirinya payah segalanya.

Orang dengan inferiority complex rentan memencilkan diri dari pergaulan. Jika gejala ini dibiarkan bisa mempengaruhi interaksi atau hubungan sosial.

Hal yang mempengaruhi inferiority complex

1. Pengalaman masa kecil

Anak-anak rentan tumbuh dalam perasaan lemah dan tidak mampu. Hal itu diperburuk jika orang tua tidak bisa membantu kepribadian anaknya tumbuh sebagai orang yang mampu berdaya. Pemicu lainnya ketika anak-anak tumbuh di lingkungan yang berulang kali membuat nilai dirinya mengembangkan sikap malu-malu dan khawatir berlebihan terhadap kemampuan diri.

2. Perisakan fisik

Terkadang berat badan, bentuk wajah, atau ciri-ciri tubuh lainnya menjadi faktor yang membuat orang minder di lingkungan pergaulan. Tapi, kondisi itu dipengaruhi dari orang-orang di sekitarnya yang membicarakan tentang tubuh.

Kondisi itu bisa mempengaruhi secara ekstrem menilai diri seperti merasa banyak kekurangan. Perisakan fisik salah satu kondisi yang rentan berakibat inferiority complex.

3. Tantangan ekonomi dan sosial

Kesulitan finansial seperti mengorbankan kebutuhan penting untuk membayar masalah yang mendesak, salah satu contohnya. Jika terus-menerus seperti itu rentan berakibat inferiority complex.

Misalnya, finansial yang terlalu sulit menyebabkan harus selalu menghubungi orang lain untuk meminta bantuan. Kondisi itu bisa berdampak negatif mempengaruhi harga diri.

Mengutip WebMD, pria tergolong rentan inferiority complex. Itu akibat dari tekanan budaya maskulin kaum pria atau toxic masculinity.

Fenomena sosial itu membuat pria merasa harus

terus menekan respons emosional normal dan menjadi lebih unggul secara fisik, mental, dan finansial. Pria cenderung merasa rendah diri dan payah dalam menjalin hubungan, khususnya ketika dibandingkan dengan pasangan masa lalu kekasihnya.

Orang dengan inferiority complex berisiko mengalami masalah kesehatan mental lainnya seperti depresi dan kecemasan.

Jika Anda menyadari ada tanda-tanda inferiority complex dalam diri Anda, cara terbaik untuk mengatasinya adalah dengan mencari bantuan ke psikolog. Dengan bantuan profesional, nantinya Anda dibantu menggali lebih dalam apa sebenarnya yang menjadi penyebab munculnya inferiority complex.

Melalui terapi ini, pikiran negatif tentang diri sendiri bisa perlahan-lahan diubah ke arah yang positif. Selain itu, Anda juga bisa diberi panduan yang tepat untuk mengatasi hal-hal yang tidak menyenangkan tentang diri sendiri. (Berbagai

BEBERAPA CARA AGAR BISA LEBIH MENGHARGAI DIRI SENDIRI:

- Berusaha mengakui setiap kemajuan atau pencapaian yang pernah diraih sebelumnya agar bisa mendalami bakat yang mungkin selama ini terpendam
- Menulis perasaan yang sebenarnya tentang diri sendiri dalam sebuah jurnal
- Membiasakan berbicara pada diri sendiri dengan afirmasi positif, misalnya “aku berharga, berbakat, dan layak untuk dicintai”, sebagai pemicu untuk lebih berpikir positif terhadap diri sendiri

Inferiority complex penting untuk ditangani dengan tepat, karena sebagian penderitanya bisa tersiksa dengan perasaan rendah diri yang terus muncul dan justru mengalihkannya dengan hal-hal negatif, misalnya minuman beralkohol secara berlebihan atau bahkan menggunakan obat terlarang



Mendadak Al-Zaytun (dari hal 1)

KEPALA Kantor Staf Presiden Moeldoko menepis isu hubungan dirinya dan Pondok Pesantren Al Zaytun. Moeldoko mengarahkan semua pihak agar tidak mempolitisasi pondok pesantren.

Moeldoko menyatakan setiap orang memiliki hak politiknya masing-masing. Walau demikian, menurutnya, hak politik tersebut tidak boleh digunakan untuk mempolitisasi pondok pesantren, dalam hal ini Ponpes Al Zaytun.

"Sapapun bisa mendekati Al-Zaytun, termasuk partai politik. Tapi jangan dipolitisasi. Al Zaytun ini setiap mau Pemilu ribut terus," kata Moeldoko di kantornya, Kamis (13/7/2023).

Moeldoko juga menepis tuduhan oleh Pendi Yayasan Pesantren Indonesia Imam Supriyanto. Imam menyatakan Moeldoko sebagai pihak yang menghubungkan Pimpinan Al Zaytun Panji Gumilang dengan Mabes Polri hingga partai politik.

Menanggapi hal tersebut Moeldoko mengatakan bahwa omongan Imam tidak bisa dipercaya. Peralannya, Imam menyampaikan yang diomongkan Supriyanto tidak seperti kenyataan.

"Pak Imam ini salah minum obat atau sudah mulai pikun. Jadi, omongannya enggak bisa dipercaya," kata Moeldoko.

Sebelumnya, Moeldoko bersama Presiden Joko Widodo menepis isu Istana menjadi bekungan pada kasus Pondok Pesantren Al-Zaytun. Namun Moeldoko tidak menampik adanya kedekatan dengan Pimpinan Al-Zaytun Panji Gumilang.

Moeldoko menyampaikan kedekatannya dengan Panji sebatas tugasnya sebagai Kepala KSP, yakni berkomunikasi dengan semua pihak. Oleh karena itu, ia tidak tahu apakah Al Zaytun mengajarkan aliran sesat atau tidak.

"Saya pernah ke Al-Zaytun memberikan ceramah. Memberikan ceramah kebangsaan di sana," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan, Senin (26/6/2023).

Senada, Jokowi menegaskan Istana Kepresidenan tidak memberikan dukungan apapun kepada Al-Zaytun. Selain itu, Kepala Negara membantah adanya hubungan antara Moeldoko dan Al Zaytun.

"Pak Menko Polhukam dan Pak Menteri Agama sudah saya perintahkan untuk mendalami. Nanti, kalau hasilnya sudah ada saya sampaikan," kata Jokowi dalam saluran resmi Sekretariat Presiden, Senin (26/6/2023).

Janji Tak Ada Kecurangan

Isu kontroversi Ponpes Al-Zaytun selalu mencuat tiap kali Pemilu. KPU dan Bawaslu Indramayu memastikan tidak ada potensi masalah, termasuk penggelembungan suara seperti yang pernah terjadi tahun 2004.

Ketua Bawaslu Indramayu Nurhadi mengatakan potensi penggelembungan suara TPS Khusus di Ponpes Al Zaytun pada Pemilu 2024

sangat kecil. Terlebih panitia penyelenggara Pemilu sudah melakukan deteksi dini.

"Salah satunya kita pastikan dahulu ada berapa jumlah pemilih yang memenuhi syarat di Al Zaytun," ujar Nurhadi, Kamis (13/7/2023).

Di Al-Zaytun akan ada TPS khusus merujuk PKPU 7 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Daftar Pemilih terutama di Pasal 179, mengenai Syarat-syarat untuk Pembentukan TPS Khusus.

"Di antaranya lapas, relokasi bencana, panti sosial atau panti asuhan dan tempat lain yang jumlah pemilihnya banyak tapi tidak bisa pulang ke daerahnya yang minimal jumlah suaranya 300 pemilih," jelas Nurhadi.

Ketua KPU Indramayu Ahmad Toni Fatoni mengatakan dari hasil verifikasi pertama yang dilakukan oleh KPU dan Bawaslu secara langsung, terdapat 825 pemilih yang diajukan.

"Dan saat dilakukan verifikasi Kedua hanya ada 815 pemilih yang memenuhi syarat," ujar Toni dihubungi terpisah.

Dengan adanya pengajuan dari warga Ponpes Al Zaytun tersebut kemudian KPU RI menyetujui dengan membuat TPS lokasi khusus (Lokus) sebanyak 3 TPS di dalam Ponpes Al-Zaytun untuk memfasilitasi 815 pemilih tersebut.

Nurhadi pun kembali menjelaskan masing-masing TPS itu nantinya maksimal hanya bisa digunakan oleh 300 pemilih saja. Ketua KPU Kabupaten Indramayu, Ahmad

"Dan di setiap TPS tersebut memang tidak menutup kemungkinan ada Daftar Pemilih Tambahan, tetapi dibatasi hanya 2 persen dari 300 pemilih," kata Nurhadi.

Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) adalah pemilih yang pindah memilih biasanya karena alasan pekerjaan atau pendidikan. Syaratnya mengurus form pindah memilih atau A5.

Ahmad Toni Fatoni menegaskan untuk masing-masing TPS yang berada di dalam Ponpes Al-Zaytun kalau pun ada Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) hanya berjumlah 6 pemilih.

"Jadi jika terjadi penambahan jumlah suara dari data yang kita verifikasi, kita akan langsung mengetahuinya," pungkas Ketua KPU Indramayu.

Bareskrim Periksa Saksi Ahli Agama dari NU

Sementara itu, Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum atau Dittipidum Bareskrim Polri mendalami kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun Panji Gumilang dengan meminta keterangan saksi ahli di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadhan menga-takan penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

"Hari ini, diperiksa saksi ahli agama dari Kemenag, NU,

Muhammadiyah, dan MUI," kata Ramadhan saat dikonfirmasi.

Pemeriksaan terhadap saksi ahli dijadwalkan berlangsung selama dua hari sejak Rabu (12/7/2023). "Kemarin (Rabu) diperiksa seorang saksi ahli bahasa," ujarnya.

Selain saksi ahli agama Islam, penyidik Bareskrim Polri juga dijadwalkan permintaan keterangan dari ahli informasi dan teknologi serta ahli sosiologi.

Meski demikian, Ramadhan enggan merinci siapa saja saksi ahli yang diminta keterangan terkait perkara di Ponpes Al-Zaytun. Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri tidak hanya menangani soal dugaan penistaan agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri sedang mendalami dugaan TPPU di ponpes tersebut setelah menerima laporan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Terkait dugaan penistaan agama, Bareskrim Polri menerima dua laporan polisi terhadap pimpinan Ponpes Al-Zaytun Panji Gumilang, yakni laporan dari Forum Pembela Pancasila (FAPP) pada Jumat (23/6) dan dari Negara Islam Indonesia (NII) Crisis Center Ken Setiawan pada Selasa (27/6).

Panji Gumilang dilaporkan terkait dugaan pelanggaran Pasal 156 A tentang penistaan agama. Namun, dari hasil gelar perkara tambahan penyidik menemukan dugaan pelanggaran pidana Pasal 45a ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan/atau Pasal 14 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Saat pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2004, terjadi mobilisasi massa dan penggelembungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di ponpes itu. Tak ayal, peristiwa ini mencoreng gelaran Pemilu 2004

Laporan menyebutkan setidaknya ada penggelembungan suara di 83 TPS di Ponpes Al Zaytun.

Selain itu, rekaman video yang ditunjukkan Panitia Pengawas Pemilu (Panwas) memperlihatkan adanya pengumpulan massa dengan menggunakan kendaraan menuju ke ponpes.

Diperkirakan kendaraan yang datang ke wilayah Ponpes Al Zaytun itu berjumlah sekitar 519 mobil.

Rekaman itu juga menunjukkan betapa canggihnya TPS-TPS di sekitar ponpes itu. TPS itu dilengkapi dengan pesawat telepon dan komputer.

Rekaman gambar juga memperlihatkan pengusiran salah satu anggota Panwas yang ingin masuk ke TPS tetapi diusir oleh seorang anggota KPPS dan anggota hansip.

Menurut Ketua Panwas Kecamatan Gantar, Sudirman Gandaatmadja, para saksi dari empat tim pasangan capres-cawapres tidak diperbolehkan masuk untuk mengikuti jalannya pemilu di TPS.

Hal paling penting untuk diklarifikasi ke KPU Kabupaten Indramayu adalah jumlah TPS

sebanyak 83 di ponpes tersebut apakah sah atau tidak, karena di 83 TPS itu mencakup 24.000 pemilih.

Pada saat pemilu legislatif itu, pemilih yang terdaftar di ponpes hanya 5.000 pemilih kemudian melonjak menjadi 13.000 pemilih saat pendaftaran pemilih pemilu presiden.

Selanjutnya, hari H pencoblosan pemilu presiden suara pemilih menjadi 24.000. Hasil di TPS tersebut calon presiden dari Partai Golkar Wiranto lebih unggul dari empat capres lainnya.

Dari total jumlah pemilih sebanyak 24.843 pemilih, Wiranto-Wahid memperoleh 24.794 suara atau 99,8 persen. (wid,rla, kum, ist/dya)

GEGER AL-ZAYTUN

PIMPINAN PANJI GUMILANG

Sejarah Al-Zaytun



Pendiri **Abdus Salam Panji Gumilang**



1996 dibangun oleh **Yayasan Pesantren Indonesia (YPI)**



Berdiri di area tanah **1.200 hektare**



1999 diresmikan **Presiden B.J. Habibie**



Tutut Soeharto ikut memancang tiang pertama bangunan



2003 A.M. **Hendropriyono** mengancam akan menghajar siapa saja yang melawan Al-Zaytun

Kontroversi Penyimpangan

- Al-Qur'an perkataan Nabi Muhammad SAW, bukan Kalam Allah
- Menafsirkan Al-Qur'an secara serampangan
- Saf salat berjarak, dan bercampur pria-wanita
- Menyanyikan "Havenu Shalom Alaichem" lagu Yahudi
- Haji tak perlu ke Makkah
- Dosa zina bisa ditebus Rp2 juta
- Azan tidak menghadap kiblat
- Al-Zaytun tertutup terhadap warga sekitar ponpes



Menebak Inisial S Terkait Pengembalian Uang Rp 27 M di Kasus BTS

JAKARTA-Tim pengacara hukum terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan, Maqdir Ismail membawa tumpukan uang pecahan dolar Amerika saat tiba di Gedung Bundar Jampidsus, Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (13/7/2023). Maqdir Ismail mengembalikan uang milik terdakwa Irwan Hermawan senilai USD 1,8 juta atau sekitar Rp27 miliar dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 BAKTI Kominfo.

Kejaksaan Agung (Kejagung) belum dapat memastikan status hukum terhadap uang Rp 27 miliar yang diserahkan itu. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kuntadi mengatakan, masih mendalami uang yang diserahkan Pengacara Maqdir Ismail tersebut.

Satu yang terang dari penyerahan uang kontan 1,8 juta dolar AS tersebut, adalah terungkapnya inisial S. Sosok S disebut sebagai perantara pengembalian uang kepada Irwan melalui Maqdir. Namun begitu, Kuntadi mengatakan, sampai saat ini, belum diketahui pengembalian Rp 27 miliar oleh S, bersumber dari siapa.

Dari pemeriksaan terhadap Maqdir, Kamis (13/7/2023), pun dikatakan Kuntadi, tak terungkap tentang siapa di balik inisial S. "Bahwa yang melakukan pengembalian tersebut adalah inisial S. Latar belakang, dan asalnya dari mana, maksud dan tujuannya apa, sampai hari ini, kami tidak tahu. Karena dari pihak yang kami periksa, saudara Maqdir Ismail, juga tidak mengetahui," kata Kuntadi.

Kuntadi menjelaskan, penyidikan memang sudah menerima penyerahan uang Rp 27 miliar oleh Maqdir. Akan tetapi, kata Kuntadi, tim penyidik belum dapat menyimpulkan status hukum dari uang tersebut. Namun Kuntadi menambahkan, tetap melakukan penguasaan sementara terhadap uang tersebut.

"Pendalaman masih terus kami perlukan dalam rangka untuk menentukan status uang ini. Apakah benar bisa dipergunakan untuk alat bukti, atau untuk memulihkan kerugian negara, atau malah sekadar barang temuan saja," begitu kata Kuntadi.

Kesimpulan status hukum terhadap penyerahan uang Rp 27 miliar tersebut ke penyidikan nantinya, akan menentukan dampak hukum lanjutan bagi pihak yang mengembalikan. "Karena konsekuensi hukumnya akan berbeda-beda. Uang ini (Rp 27 miliar) harus bisa didudukkan dengan baik, dan setepat mungkin," ujar Kuntadi.

Geledah Empat Tempat

Penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) mengeledah empat lokasi terpisah dalam pengusutan



Maqdir Ismail, pengacara Komisaris PT Solitech Media Sinergy Irwan Hermawan (tengah) membawa uang 1,8 juta dolar Amerika ke Kejaksaan, Kamis (13/7/2023). (ist)

aliran uang korupsi BTS 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) 2020-2022.

Pengegeledahan oleh tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut dilakukan sepanjang awal pekan di tiga tempat berbeda, dan Kamis (13/7/2023) di kantor pengacara terdakwa Irwan Hermawan (IH), Maqdir Ismail.

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Ketut Sumedana menerangkan, tiga lokasi sudah dikeledah sejak Senin (10/7/2023). Tiga lokasi tersebut yakni di PT MBS atau PT VP di Kompleks Pergudangan Arkadia di Jalan Daan Mogot, Permai, Blok B 16, Batu Ceper, Tangerang, Banten.

Kemudian kepada di PT RMKN di Jalan Praja Dalam, Blok D, Nomor 52, di Kebayoran Lama Jakarta Selatan (Jaksel). Terakhir di PT LAM di Telesindo Tower, di Jalan Gajah Mada 27 A, di Lantai-8 Jakarta Selatan (Jaksel).

"Pengegeledahan-pengegeledahan tersebut dilakukan terkait perkara BTS, terkait dengan aliran-aliran dana korupsi BTS," kata Ketut saat konferensi pers di Gedung Pidana Khusus (Pidsus), Kejagung, di Jakarta, Kamis (13/7/2023).

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menambahkan, pada Kamis (13/7/2023), timnya juga melakukan pengegeledahan lanjutan di Kantor Pengacara Maqdir Ismail. "Kami juga melakukan pengegeledahan di kantor saudara Maqdir Ismail untuk mencari alat bukti terkait pengembalian uang," kata Kuntadi.

Kuntadi menjelaskan, pengegeledahan yang dilakukan di empat tempat tersebut memang terkait dengan pengusutan aliran-aliran dana yang disebut-sebut oleh terdakwa Irwan. Kuntadi tak menerangkan semua lokasi geledah tersebut terkait dengan pihak mana. Akan tetapi,

Kuntadi mengkonfirmasi, pengegeledahan yang dilakukan di Jalan Praja Dalam, Kebayoran Lama, terkait dengan informasi penempatan uang hasil korupsi oleh salah satu tersangka dalam kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo.

Lokasi pengegeledahan di Jalan Praja tersebut, disinyalir menjadi tempat bagi salah satu pegiat media sosial, yang juga mantan caleg PDI Perjuangan (2004), dan Partai Demokrat (2019) inisial AW. "Yang di rumah di Praja Dalam itu, betul itu kantor dari yang bersangkutan (inisial AW)," jelas Kuntadi.

Adapun terkait dengan pengegeledahan di Kantor Pengacara Maqdir Ismail, dilakukan penyidik berbarengan dengan proses pemeriksaan terhadap pegacara terdakwa Irwan Hermawan itu. Kuntadi menerangkan, pengegeledahan itu dilakukan untuk pencarian alat bukti tentang pengembalian uang Rp 27 miliar.

Pengegeledahan di Telesindo Tower, terkait dengan PT Lawu Agung Mining (LAM). Perusahaan tersebut disebut-sebut kepemilikannya oleh yang bernama Windu. Nama tersebut, terungkap dalam berita acara pemeriksaan (BAP) Irwan yang menyerahkan uang senilai Rp 75 miliar terkait korupsi BTS 4G BAKTI.

Kuntadi melanjutkan, tim penyidikannya akan terus mendalami soal aliran-aliran uang dalam pengakuan Irwan dalam BAP-nya tersebut. Sebelumnya tim penyidik, juga sudah memeriksa sejumlah nama-nama yang disebut-sebut oleh Irwan turut menerima aliran dana.

Beberapa yang sudah diperiksa adalah Dito Ariotedjo, Senin (3/7/2023) yang disebut-sebut ada menerima Rp 27 miliar. Pada Rabu (5/7/2023) tim penyidik di Jampidsus juga memeriksa Edward Hautahean seorang pengacara yang disebut Irwan dalam BAP-nya ada menerima aliran dana Rp 15 miliar.

Pada Kamis (6/7/2023), tim

penyidik Jampidsus juga memeriksa Erry Sugiharto, yang disebut oleh Irwan ada menerima dana sekira Rp 10 miliar. Gelontoran uang tersebut, dikatakan Irwan untuk proses 'pengamanan' kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kemenkominfo yang merugikan negara Rp 8,03 triliun tersebut.

Maqdir Pernah Serahkan Rp 8 M

Terpisah Pengacara terdakwa kasus korupsi BTS Kominfo Irwan Hermawan, Maqdir Ismail, mengatakan penyerahan uang USD 1,8 juta atau Rp 27 miliar ke Kejaksaan Agung (Kejagung) bukan pertama kalinya. Dia mengaku juga sebenarnya sudah pernah menyerahkan uang Rp 8 miliar.

"Perlu juga diketahui kami pun, ini bukan yang pertama kami serahkan kepada Kejaksaan, sebelumnya kami juga sudah menyerahkan uang sejumlah Rp 8 miliar untuk dan atas nama kepentingan Irwan," kata Maqdir Ismail kepada wartawan di Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (13/7/2023).

Maqdir mengatakan uang Rp 8 miliar dan Rp 27 miliar itu diterima dari sumber yang berbeda. Dia berharap penyerahan uang itu akan meringankan Irwan.

"Sementara yang sudah kami serahkan baru Rp 8 miliar ditambah Rp 27 miliar lebih ini, sehingga kami harapkan ini akan mengurangi bebannya Irwan. Jadi kalau ada kawankawan yang kalau pun mau menyumbang Irwan, kami akan terima dan serahkan ke Kejagung," ujarnya. (wid,rls,ant,ist/dya)

DAFTAR PIHAK YANG DIDUGA MENERIMA ALIRAN DANA DARI IRWAN HERMAWAN:

1. April 2021 - Oktober 2022. SM. Rp 10.000.000.000.
2. Desember 2021. AL. Rp 3.000.000.000.
3. Pertengahan tahun 2022. FR, EV, PKJ. Rp 2.300.000.000.
4. Maret 2022 dan Agustus 2022. LH. Rp 1.700.000.000.
5. Desember 2021 dan pertengahan tahun 2022. NA. Rp 70.000.000.000.
6. Pertengahan tahun 2022. ER (Pertamina). Rp 10.000.000.000.
7. Agustus - Oktober 2022. WS. Rp 75.000.000.000.
8. Agustus 2022. EH. Rp 15.000.000.000.
9. November - Desember 2022. DA. Rp 27.000.000.000.
10. Juni - Oktober 2022. WL. Rp 4.000.000.000.
11. Pertengahan 2022. SDKN. Rp 40.000.000.000.

